

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sector publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Darwanto dan Yustikasari, 2007: 3).

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah

(Darwanto dan Yustikasari, 2007: 3). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Hal ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007: 3). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Saragih (2003: 129) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dan Yustikasari (2007: 4) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan anggaran belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Andirfa (2009), mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh”. Menurutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengelola keuangan daerah termasuk kebijakan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Darwanto, dan Yustikasari (2007) juga meneliti hal serupa dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah se Jawa-Bali”. Menurutny ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran Belanja Modal, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti dan Sugiartianan (2012). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti dan Sugiartianan (2012). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peneliti menggunakan periode penelitian 2008 – 2012, karena dengan menggunakan data lima tahun terakhir dari penyusunan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Iin Indarti dan Sugiartianan (2012) adalah pada objek penelitian dan penelitian saat ini juga memiliki persamaan variabel yang diteliti (Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal).

Dari uraian di atas maka peneliti ini mengambil judul: **"PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN BOYOLALI PERIODE TAHUN 2005 – 2012"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditengahkan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja modal.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan berfikir dalam pengembangan wawasan dalam bidang pengalokasian anggaran belanja modal serta sebagai ajang yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris bagi para akademisi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang berkaitan dengan pengalokasian anggaran belanja modal sehingga dapat tercapai *good governance*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan pembahasan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengemukakan tentang penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan pembahasannya serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang.